



POTRET

SENSUS PENDUDUK 2020 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENUJU
SATU DATA KEPENDUDUKAN
INDONESIA



POTRET

SENSUS PENDUDUK 2020 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENUJU
SATU DATA KEPENDUDUKAN
INDONESIA

**Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur
Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia**

ISBN : 978-623-7693-20-8 (PDF)

No. Publikasi: 64000.2113

Katalog: 2102041.64

Ukuran Buku: 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: x + 26 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

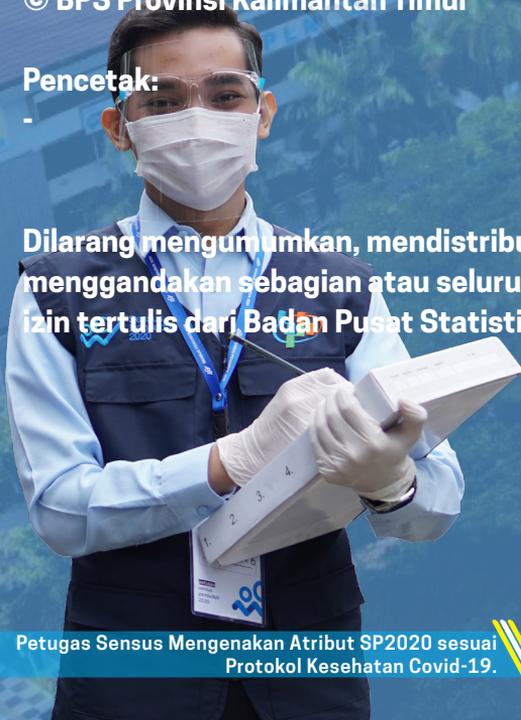
Penerbit:

© BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pencetak:

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Petugas Sensus Mengenakan Atribut SP2020 sesuai Protokol Kesehatan Covid-19.

Atribut Petugas Sensus berupa Tanda Pengenal dengan Barcode, Rompi Biru Tua, dan dilengkapi APD.

An aerial photograph of a city, likely Banjarmasin, Indonesia, with a blue overlay. The image shows a mix of modern high-rise buildings and older structures, with a prominent road and green spaces in the foreground.

TIM PENYUSUN

**Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur
Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia**

**Pengarah:
Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono M.Si.**

**Penanggung Jawab:
Edi Waryono S.Si., M.Kesos.**

**Penyunting:
Edi Waryono S.Si., M.Kesos.**

**Penulis:
Ely Uswatun Kasanah, SST, M.Ec.Dev
Joko Affandy Alhuda, S.Si., M.Stat
Ucik Purnamasari, S.Si.**

**Desain/Layout:
Ukhti Winar Setyaningrum, SST**

1 Data yang valid merupakan **kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara** karena data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran.

2 Kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai **Kementerian dan Lembaga menjadi salah satu penyebab** tidak optimalnya **pelaksanaan kebijakan pemerintah.**

3 **Kolaborasi antarlembaga dan meninggalkan ego sektoral.**

Presiden Joko Widodo

1. Penganjangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara pada tanggal 24 Januari 2020
2. Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019
3. Peresmian Pembukaan Rakortek SE2016 di Istana Negara, 2016



Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Kalimantan Timur adalah provinsi dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, Kalimantan Timur merupakan provinsi terbesar ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dengan strategi yang tepat, penduduk dapat menjadi kekuatan bangsa untuk Indonesia Maju. Demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju, BPS berikhtiar menyelesaikan amanat untuk melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Atas seijin Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan kerja keras seluruh pihak, pendataan lapangan SP2020 telah selesai dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian tata kelola di setiap tahapannya dan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.

Meskipun SP2020 dilaksanakan di tengah pandemi, namun terdapat beberapa inovasi yang diterapkan. Salah satunya adalah penggunaan metode kombinasi yang baru pertama kali diterapkan dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia. Metode kombinasi dalam SP2020 adalah penggunaan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Selangkah lebih dekat menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, BPS bersama Ditjen Dukcapil merilis hasil SP2020. Perjalanan pelaksanaan dan hasil SP2020 disajikan secara ringkas dalam *booklet* Potret Sensus Penduduk 2020 Kalimantan Timur Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia.

Booklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Kalimantan Timur sampai dengan level kabupaten/kota. Cakupan data dasar dari hasil SP2020 meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan penduduk. Data-data tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data kependudukan terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian.

Booklet ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga *booklet* ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak untuk berbagai kepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan sensus penduduk di masa yang akan datang.

Samarinda, Januari 2021
Kepala Badan Pusat Statist
Provinsi Kalimantan Timur



Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si.



Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur



Salah Satu Kegiatan Publikas awal SP 2020 di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda September 2019

DAFTAR ISI

▪ Perjalanan Sensus Penduduk 2020	1
▪ Sensus Penduduk Online	11
▪ Penduduk Kalimantan Timur	
Hasil Sensus Penduduk 2020	15
▪ Tabel-Tabel	23

DAFTAR SINGKATAN

Bakohumas	: Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
CAPI	: <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i>
CAWI	: <i>Computer Aided Web Interviewing</i>
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
Ditjen Dikti	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DOPU	: <i>Drop Off and Pick Up</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DP	: Daftar Penduduk
K/L	: Kementerian/Lembaga
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAPI	: <i>Paper and Pencil Interviewing</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNSD	: <i>United Nations Statistics Division</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Perpres	: Peraturan Presiden Republik Indonesia
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-undang
WAG	: Whatsapp Group
Wilkerstat	: Wilayah Kerja Statistik
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia



Perjalanan Sensus Penduduk 2020



PETUGA
SENSUS



Mencatat Indonesia: Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia

Data penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena data penduduk digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan.

Data penduduk merupakan salah satu jenis data yang berpotensi terdapat perbedaan di antara kementerian/lembaga. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan referensi waktu, konsep-definisi, termasuk perbedaan metodologi pengumpulan data. Dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi berbagai perbedaan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Dalam hal ini, SP2020 merupakan titik awal dalam *roadmap* mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, melalui integrasi data administrasi kependudukan sebagai basis data pelaksanaan SP2020.

Data kependudukan dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik

2024

Data kependudukan yang reliabel membuka akses lebih luas pada layanan publik

Perbaiki mekanisme pemutakhiran data kependudukan

Integrasi data kependudukan dalam SIAK dengan Sensus Penduduk

Sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung ke basis data kependudukan

Masyarakat terlibat aktif dalam peningkatan kualitas data kependudukan

ROADMAP SATU DATA KEPENDUDUKAN
Sumber: Kemen-PPN/Bappenas (2019)

Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Tujuan Pelaksanaan SP2020



Melalui pendataan lengkap di tahun 2020, SP2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju **"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA"**.

Melalui pendataan sampel di tahun 2021, SP2020 bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk kepentingan penghitungan proyeksi penduduk, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan monitoring pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Gambaran Pelaksanaan SP2020

1. SP2020 bertujuan untuk mencatat Indonesia dengan menggunakan metode kombinasi memanfaatkan basis data Administrasi Kependudukan (Adminduk).
2. SP2020 mencatat WNI dan WNA yang telah tinggal di wilayah teritorial Indonesia minimal 1 tahun atau berniat untuk menetap di Indonesia minimal 1 tahun, termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri/ wilayah teritorial Indonesia beserta keluarganya.
3. Pencatatan penduduk dalam SP2020 dilaksanakan di wilayah penduduk biasanya bertempat tinggal berdasarkan konsep kependudukan dengan referensi waktu minimal 1 tahun.
4. SP2020 mencatat Indonesia dengan berbagai moda, yaitu *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) pada SP Online, serta *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) dan *Drop Off and Pick Up* (DOPU) pada SP September.
5. Periode pendataan penduduk adalah 15 Februari - 29 Mei 2020 (SP Online) dan September 2020 (pendataan lapangan).



DASAR PENYELENGGARAAN

Jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk semua kebijakan negara. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP No. 51 Tahun 1999 mengamanahkan Badan Pusat Statistik untuk menghitung jumlah penduduk melalui sensus penduduk. Pencatatan penduduk juga diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 dan perubahannya pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta oleh UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan agar semua negara memiliki statistik kependudukan dan perumahan setidaknya sekali dalam periode 2015-2024. PBB juga menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (*full canvassing*) menuju ke *register based census*. Dalam perjalanannya menuju ke *fully register based census*, sensus penduduk dapat dilaksanakan dengan metode kombinasi dahulu yaitu mengkombinasikan data registrasi dengan data sensus. Keuntungan metode ini adalah meningkatkan keakuratan data; saling melengkapi kedua sumber data; memeriksa, memutakhirkan, dan meningkatkan kualitas kedua sumber data; menjadi bingkai penghubung untuk menyatukan berbagai sumber data.

Oleh karena itu, SP2020 dirancang dengan menggunakan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar. Hal ini juga dimaksudkan agar SP2020 menjadi *bridging* untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Upaya mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia juga diperkuat oleh Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Perpres ini mengatur kebijakan tata kelola data pemerintah, termasuk data kependudukan. Data dikelola agar dapat dibagipakaikan antar-instansi pemerintah dengan memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi dan data induk. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah bekerja sama untuk membangun satu data yang terintegrasi secara utuh tentang Indonesia. Lebih lanjut, setiap instansi pemerintah akan menghasilkan data yang selaras.

Sinkronisasi data juga dilandasi oleh Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKSPH). Perpres ini bertujuan untuk percepatan pencatatan seluruh peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain. Sehingga setiap penduduk dapat memiliki dokumen kependudukan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Pencatatan peristiwa tersebut dan hasil SP2020 merupakan sumber data untuk penghitungan Statistik Hayati.

Dalam hal ini, SP2020 menjadi sebuah titik awal dalam pengembangan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sehingga SP2020 dapat menjadi bingkai penghubung untuk integrasi data dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.



UU No.16 Tahun 1997
tentang Statistik
UU No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
UU No.52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
UU No.24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas UU No.23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan



**United Nations
Recommendations 2017**



Perpres No.39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (SDI)



Perpres No. 62 Tahun 2019
tentang Strategi Nasional Percepatan
Administrasi Kependudukan untuk
Pengembangan Statistik Hayati (AKSPH)

METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

SP2020 dilaksanakan menggunakan metode kombinasi yang merupakan titik peralihan pelaksanaan sensus dari metode tradisional (mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah) menjadi sensus penduduk yang terintegrasi dengan data registrasi, yaitu data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Metode Pelaksanaan SP2020



Sumber: UN (2017). *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses Revision 3*.

Tahapan Pelaksanaan SP2020



15 Feb – 29 Mei 2020

Penduduk melaksanakan sensus penduduk secara mandiri melalui: sensus.bps.go.id.

Informasi keberadaan penduduk yang melakukan SP Online dimutakhirkan kembali pada September 2020.



September 2020

- ▶ Pemeriksaan daftar penduduk.
- ▶ Verifikasi lapangan (*ground check*)
- ▶ Pendataan penduduk (DOPU, Non DOPU, Wawancara)



2021: PENCACAHAN SAMPEL

Pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya.

KONSEP DALAM SENSUS PENDUDUK 2020

Sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, SP2020 menggunakan konsep penduduk, keluarga, dan wilayah kerja statistik yang diselaraskan dengan konsep yang digunakan pada data Adminduk Ditjen Dukcapil. Dasar penyelarasan konsep pada SP2020 mengacu pada Undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Rekomendasi PBB tentang Sensus Penduduk dan Perumahan.

1

Konsep Penduduk

Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Namun, SP2020 menggunakan referensi waktu 12 bulan. Perubahan ini didasari oleh:

- ◇ UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15: penduduk yang sudah pindah minimal 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah.
- ◇ *System of National Account (SNA)*: Penduduk adalah mereka yang telah menetap dan berniat menetap minimal 1 tahun di wilayah Indonesia.
- ◇ *United Nations Statistics Division (UNSD)* merekomendasikan agar negara-negara menerapkan batasan 12 bulan untuk tempat biasa tinggal.

2

Konsep Rumah Tangga dan Keluarga

- ◇ Pada sensus penduduk sebelumnya, unit pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk menggunakan pendekatan rumah tangga, sedangkan SP2020 menggunakan pendekatan keluarga.
- ◇ Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
- ◇ Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar pada kartu keluarga (KK).

3

Wilayah Kerja Statistik

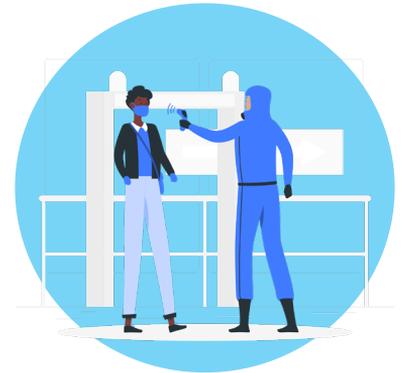
- ◇ Wilayah kerja statistik (wilkerstat) adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Wilkerstat terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus, ditambah dengan informasi satuan lingkungan setempat.
- ◇ Pada sensus penduduk sebelumnya, wilkerstat terkecil yang digunakan adalah blok sensus. Blok sensus memiliki muatan yang hampir seragam atau sekitar 80 rumah tangga. Blok sensus menjadi bagian dari kerangka sampel pada survei-survei yang dilakukan BPS.
- ◇ ◆ Wilkerstat yang digunakan pada pelaksanaan SP2020 adalah berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti RT/jorong/banjar/dusun dan lain sebagainya dengan muatan yang sangat beragam. Untuk kedepannya, BPS akan melakukan penyesuaian terhadap metodologi pengambilan sampel dalam pelaksanaan survei-survei

TANTANGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020

Tantangan

Pandemi COVID-19

- ▶ Anjuran pemerintah untuk *physical distancing*.
- ▶ Penetapan wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- ▶ Tidak diketahui kapan berakhirnya.



Refocusing Anggaran (Perpres No. 54 Tahun 2020)

Penyesuaian Anggaran SP2020;

- ▶ 4,034 triliun menjadi 1,102 triliun
- ▶ USD 1,03/capita menjadi 0,26/capita

*USD 1 = IDR 14.500,-

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah berfokus penanganan pandemi tersebut dengan pembatasan pertemuan tatap muka dan pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Anggaran SP2020 nasional mengalami pemotongan sebesar 74 persen karena dialihkan untuk pemulihan ekonomi. Semula SP2020 nasional memiliki anggaran Rp 4.034,49 miliar namun karena *refocusing* dipotong sehingga menjadi Rp 1.102 miliar.

Perubahan Struktur Anggaran pasca Perpres 54/2020 berimplikasi pada:

- ▶ **Penyesuaian Tata Kelola SP2020, dan**
- ▶ **Penyesuaian Output SP2020**

Perubahan struktur anggaran tersebut mendorong BPS melakukan penyesuaian pada setiap tahapan proses bisnis dan output dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.

SENSUS PENDUDUK 2020 DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 menghadapi semua pihak pada situasi ketidakpastian yang tinggi, namun BPS harus memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk. Selain Indonesia, sebanyak 13 negara melaksanakan sensus penduduk sesuai jadwal atau menggunakan *sensus register-based*. Sebaliknya, sebanyak 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus.

RENCANA AWAL

PENYESUAIAN

DAMPAK

SENSUS PENDUDUK ONLINE

15 Februari - 31 Maret 2020

15 Februari - **29 Mei 2020**

Nasional Jumlah Penduduk Respon 51,36 Juta Penduduk (13,05%).

Kalimantan Timur Jumlah Penduduk Respon 479.699 Penduduk (13,1%).

PENCACAHAN LAPANGAN

Periode: **September 2020**

Wawancara di semua wilayah:

- ◆ CAPI
- ◆ PAPI

Jumlah Petugas: +/- 400.000

Pelatihan petugas tatap muka

Persyaratan dan Kelengkapan petugas:

Rompi, tas, dan ATK

Periode: **September 2020**

Pembagian wilayah menjadi 3 zona:

- Zona 1: (8 Kabupaten/Kota) *Ground Check* + DOPU
- Zona 2: (2 kota: Kota Samarinda dan Kota Balikpapan) *Ground Check*
- Zona 3: *Ground Check* + Wawancara

Pelatihan jarak jauh online dan mandiri

Rompi, Tas, & ATK + Alat Pelindung Diri (**masker, face shield, sarung tangan,**

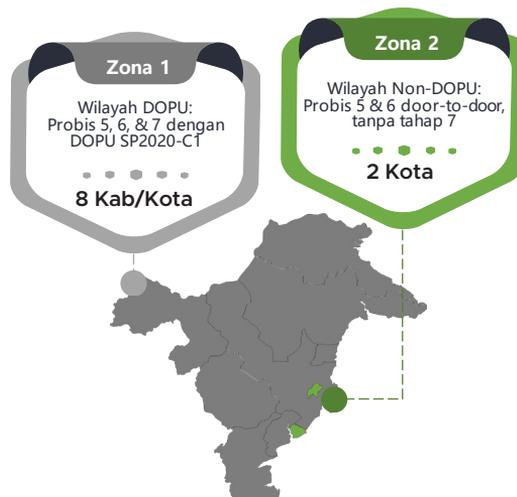
Variabel yang dihasilkan di Zona 2 sangat terbatas ► Tantangan pada diseminasi data

Beban petugas bertambah

Pemahaman petugas bervariasi

Realokasi anggaran yang tersedia untuk menjamin terlaksananya SP2020 dengan penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19

PEMBAGIAN ZONA PENDATAAN SP2020 SEPTEMBER KALIMANTAN TIMUR

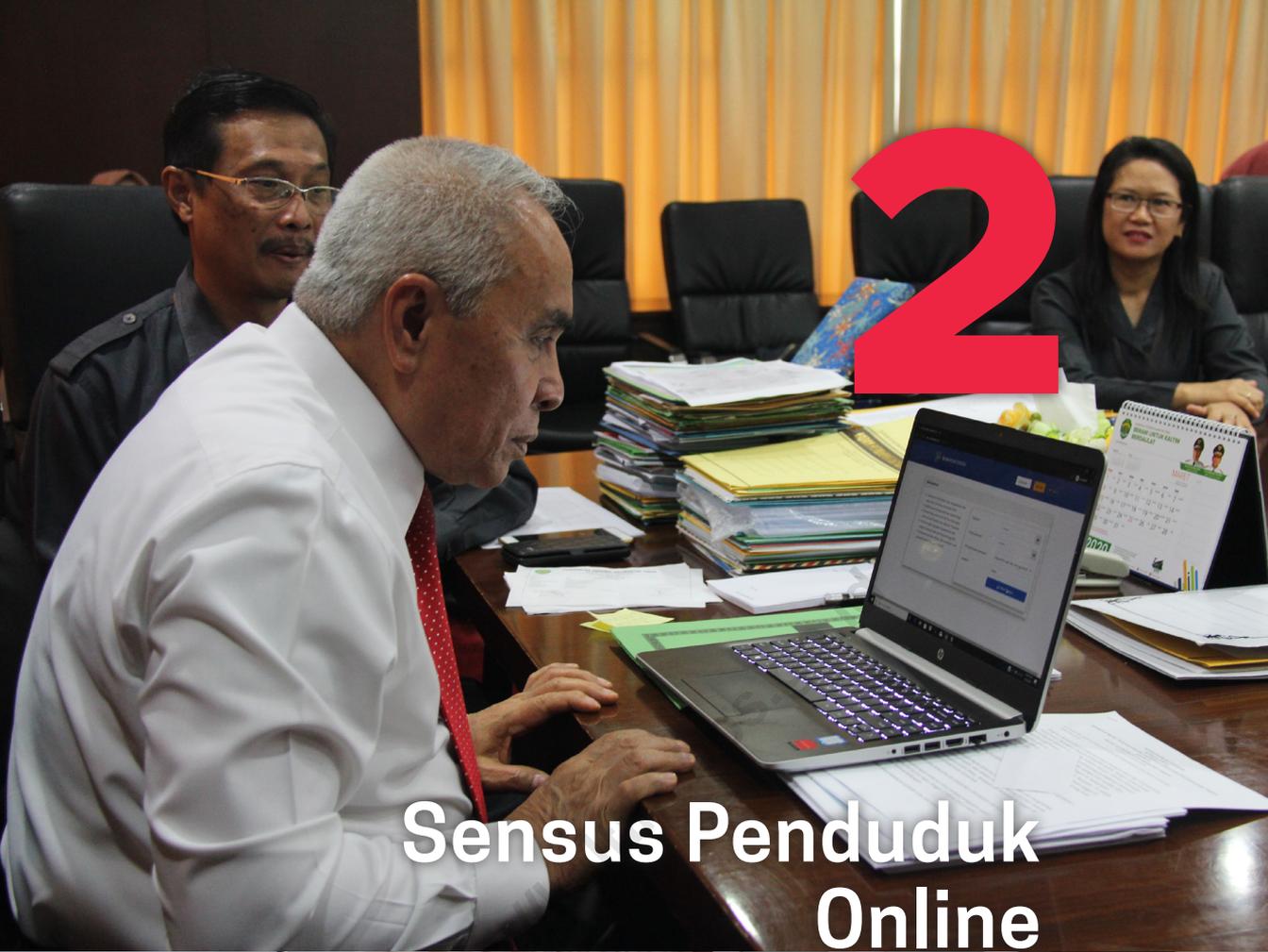


Dengan segala keterbatasan akibat adanya pandemi Covid-19, BPS Provinsi Kalimantan Timur tetap melakukan pendataan SP2020 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan Pemerintah. BPS membekali petugas lapangan SP2020 dengan rompi, tas dan ATK dengan logo SP2020 serta memakai alat pelindung diri (APD) berupa masker, *face shield*, sarung tangan, *hand sanitizer*. Petugas juga diwajibkan melakukan *rapid test* sebelum melakukan pendataan.

<https://kaltim.bps.go.id>



2



Sensus Penduduk
Online

SP Online sebagai upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam SP2020



Gubernur dan Wakil Gubernur mengisi SP Online melalui website sensus.bps.go.id

STRATEGI PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK ONLINE

SP *Online* dirancang untuk memberikan pilihan kepada penduduk Indonesia agar dapat berpartisipasi secara mandiri dalam sensus penduduk. Selain itu, SP *Online* merupakan salah satu upaya untuk menjangkau penduduk yang sulit ditemui petugas sensus, seperti penduduk yang bekerja dengan jam kerja tertentu, daerah elit, dan lain-lain.

Setelah berlangsung selama hampir 3,5 bulan, pada tanggal 29 Mei 2020 SP *Online* dinyatakan berakhir dengan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 479.699 penduduk Kalimantan Timur atau sekitar 13,1 persen telah terekam dalam SP *Online*.

Untuk memperoleh capaian tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama di tengah pandemi dan keterbatasan lainnya. Berbagai strategi dilaksanakan oleh BPS untuk meningkatkan *response rate* SP *Online*, antara lain:

1. melakukan pendekatan kepada Ketua/Pengurus SLS agar menghimbau warga berpartisipasi dalam SP *Online*;
2. memanfaatkan jejaring di institusi lain (Bakohumas, group admin media sosial K/L atau Dinas);
3. meningkatkan koordinasi dan dukungan dengan *stakeholder* kunci
 - ◆ Kemendagri : Surat edaran untuk Gubernur, Bupati/walikota
 - ◆ Kemendikbud: SP2020 sebagai tugas sekolah
 - ◆ Ditjen Dikti: SP2020 sebagai tugas kuliah
 - ◆ BKKBN: Meminta support petugas PLKB
 - ◆ Kemendes: Dukungan dari Pendamping Desa
 - ◆ TNI/POLRI
4. merekrut Sahabat Sensus dari perguruan tinggi statistika,
5. menarik dukungan *influencer* media sosial untuk mengajak masyarakat melakukan Sensus Penduduk.
6. melakukan pendampingan pengisian SP *Online* dalam komunitas.
7. mengoptimalikan peran seluruh komponen pegawai BPS. Melakukan *re-post flyer* kegiatan SP2020 di akun media sosial pribadi pegawai atau mengirim ke *Whatsapp Group* (WAG) yang dimiliki.

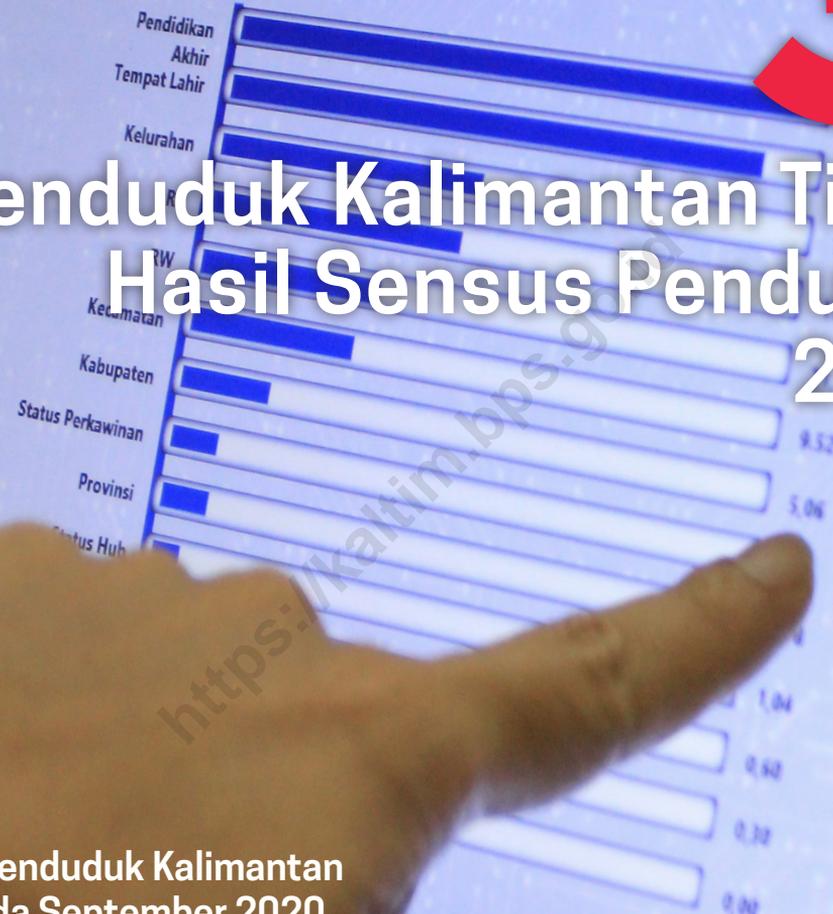


SP *Online* memberikan keyakinan bahwa sensus penduduk secara mandiri dapat dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, SP *Online* diharapkan tidak hanya digunakan pada SP2020. Kedepannya, SP *Online* diharapkan dapat digunakan sebagai moda pemutakhiran data kependudukan melalui peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait. Moda ini memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mandiri serta lebih peduli pada data pribadi. Jika catatan peristiwa penting kependudukan dapat diperoleh secara *real time* maka kualitas data kependudukan akan dapat terus ditingkatkan. Sehingga data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan terkini akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan yang lebih baik.

3

Penduduk Kalimantan Timur Hasil Sensus Penduduk 2020

Perbandingan Data Hasil
PEMUTAKHIRAN
MANDIRI (CAWI)
Data Adminduk
KONSISTEN



JUMLAH
RECORD:
672
RECORDS

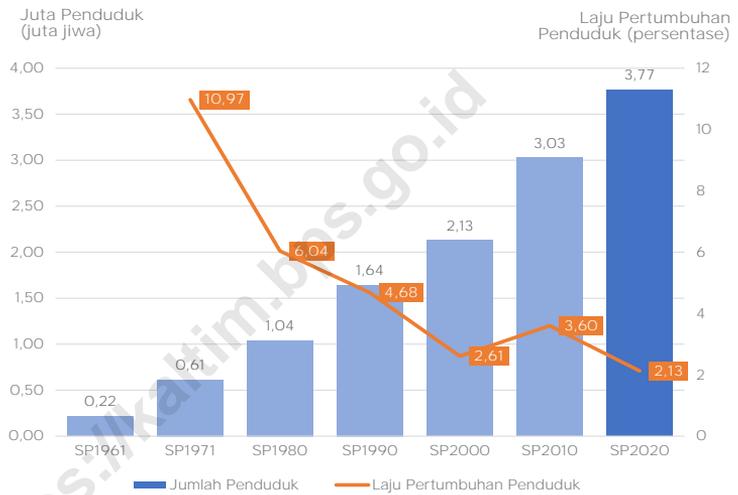
Jumlah Penduduk Kalimantan Timur pada September 2020 sebanyak 3,77 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,13 persen per tahun

JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR

Jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak **3,77 juta jiwa**

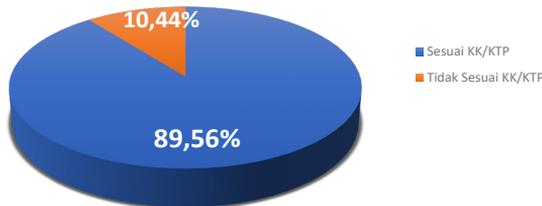
SP2020 mencatat, penduduk Kalimantan Timur pada bulan September 2020 sebanyak 3,77 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kalimantan Timur mengalami penambahan sekitar 737.552 jiwa atau rata-rata sebanyak 73.755 jiwa setiap tahun. Terdapat penurunan besaran laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 jika dibandingkan dengan periode 2000-2010. Pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir sebesar 2,13 persen, lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 yang sebesar 3,60 persen.

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur, 1961-2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Persentase Penduduk Berdasarkan Kesesuaian Alamat Domisili dan KK Kalimantan Timur, 2020



*) Perbedaan domisili di level SLS

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Dari 3,77 juta penduduk Kalimantan Timur sebesar 89,56 persen atau sekitar 3,37 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sebesar 10,44 persen atau sebanyak 393.231 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Jumlah ini merupakan indikasi kemungkinan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP lagi. Besarnya jumlah

penduduk yang berdomisili sesuai KK/KTP mengindikasikan kepatuhan penduduk Kalimantan Timur dalam administrasi kependudukan.

Laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan

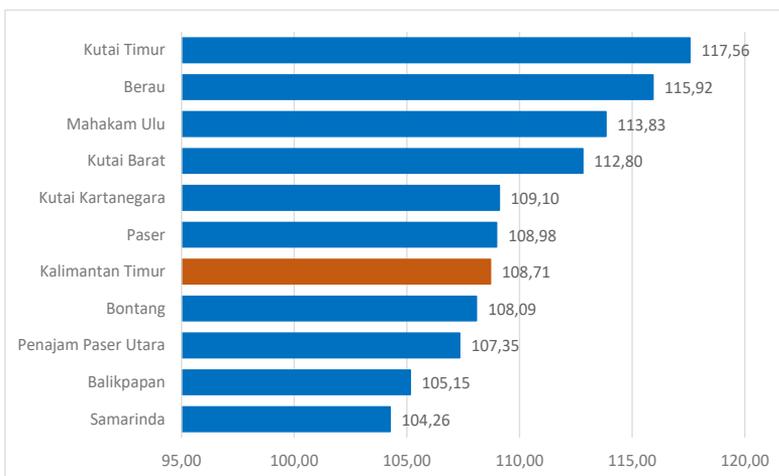
Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

pok umur, kecuali pada kelompok umur 75 tahun ke atas jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Hal ini karena angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan. Sehingga perempuan dapat mencapai umur lebih panjang dibanding laki-laki.

Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2020



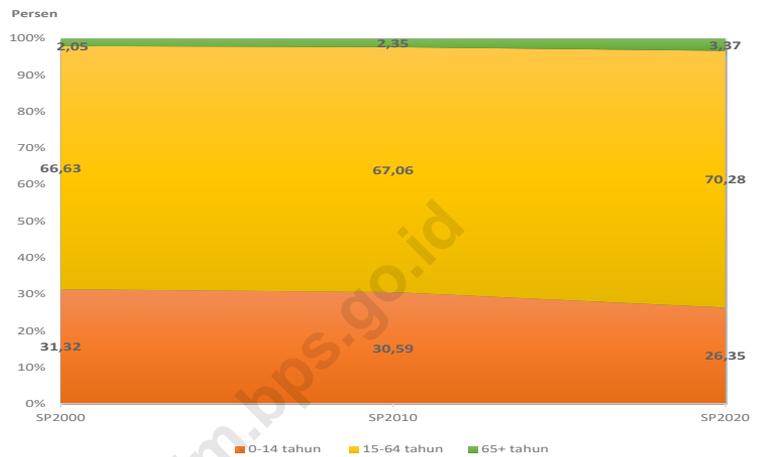
Sumber: Sensus Penduduk 2020

Sedangkan jika dipilih menurut kabupaten/kota, pada tahun 2020, BPS mencatat rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara keseluruhan selaras dengan level provinsi, dimana rasionya lebih dari 100 yang menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Dua kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kutai Timur dan Berau. Dua kabupaten ini patut menyandang gelar tersebut karena merupakan daerah pekerja migran masuk, dimana pola umum yang terjadi adalah para pekerja yang biasanya laki-laki bekerja di dua kabupaten tersebut dan meninggalkan keluarganya di daerah lain. Di lain sisi, kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah Samarinda dengan rasio jenis kelamin 104.

Generasi Z bersama Milenial Akan Menjadi Aktor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. di Kalimantan Timur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2000. Pada tahun 2000 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 66,63 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,28 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Kalimantan Timur masih berada dalam masa bonus demografi, diindikasikan dengan proporsi penduduk usia produktif lebih besar dari proporsi penduduk usia tidak produktif, karena sebesar 70,28 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

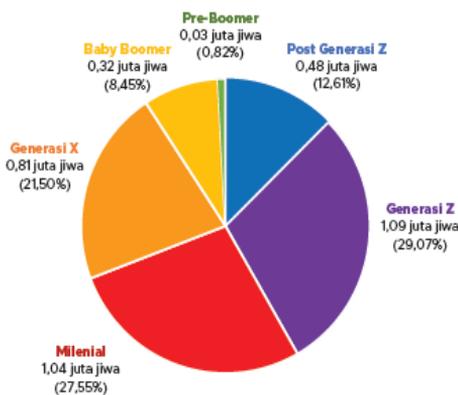
Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Timur, 1971-2020



Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan
 Sumber: Sensus Penduduk 2020

Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh generasi Z, milenial dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 29,07 persen dari total populasi (1,09 Juta jiwa). Generasi milenial sebanyak 27,55 persen dari total populasi (1,04 juta jiwa) dan generasi X sebanyak 21,50 persen dari total populasi penduduk Kalimantan Timur (0,81 juta jiwa). Generasi X, milenial dan sebagian generasi Z ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Komposisi Penduduk Kalimantan Timur Menurut Generasi, 2020



Post Generasi Z
 Lahir tahun 2013 dst
 Perkiraan usia sekarang s.d. 7 tahun



Generasi X
 Lahir tahun 1965-1980
 Perkiraan usia sekarang 40-55 tahun



Generasi Z
 Lahir tahun 1997-2012
 Perkiraan usia sekarang 8-23 tahun



Baby Boomer
 Lahir tahun 1946-1964
 Perkiraan usia sekarang 56-74 tahun



Milenial
 Lahir tahun 1981-1996
 Perkiraan usia sekarang 24-39 tahun



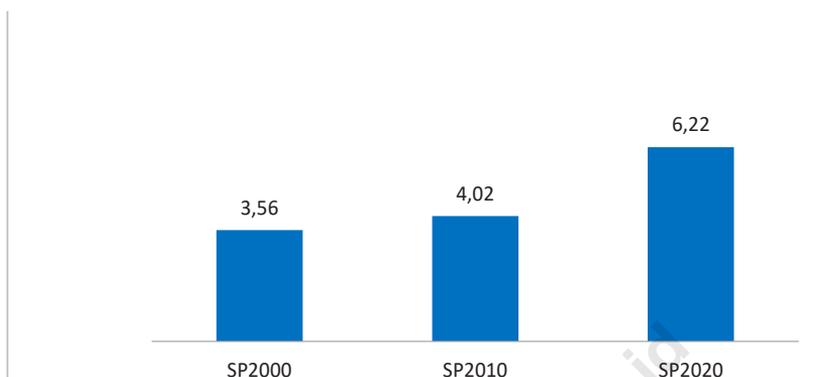
Pre-Boomer
 Lahir sebelum tahun 1945
 Perkiraan usia sekarang 75+ tahun

Sumber pengklasifikasian William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Sumber: Sensus Penduduk 2020

KALIMANTAN TIMUR MENUJU AGEING POPULATION

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Kalimantan Timur, 2000-2020



Catatan: Variabel umur dalam SP2020 menggunakan data Administrasi Kependudukan
Sumber: Sensus Penduduk 2020

Bonus demografi yang sedang dinikmati Provinsi Kalimantan Timur saat ini merupakan jendela peluang (*window opportunity*) untuk melejitkan perekonomian, karena pada masa bonus demografi, ledakan penduduk usia produktif diharapkan dapat terserap pasar kerja dan memberi nilai tambah bagi perekonomian. Jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi akan berguna bagi kemajuan wilayah, dengan catatan, kelompok lansia (lanjut usia) tetap produktif. Hal ini dikarenakan, pada saat berakhirnya masa bonus demografi, otomatis jumlah lansia akan bertambah. Oleh karena itu, kelompok lansia harus mendapatkan pelatihan untuk tetap produktif di masa tuanya. Kenaikan jumlah lansia adalah dampak dari peningkatan angka harapan hidup dan angka kelahiran suatu wilayah.

Namun di sisi lain, seiring dengan peningkatan angka harapan hidup, persentase penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan. Persentase penduduk lansia Kalimantan Timur meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2020 dari 4,02 persen pada 2010 berdasarkan hasil SP2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Kalimantan Timur masih belum memasuki era ageing population yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10 persen. Oleh karena itu, saat ini adalah masa yang tepat bagi Kalimantan Timur untuk mengambil kebijakan dalam mempersiapkan golongan lansia untuk tetap aktif dan produktif di masa tuanya.

Dalam demografi, potensi bonus demografi tercermin dari perubahan angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ini menggambarkan berapa orang yang menjadi tanggungan penduduk produktif. Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur selama sepuluh tahun terakhir berkurang dari 49,13 pada tahun 2010 menjadi 42,29 pada tahun 2020.

Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Timur, 2000-2020

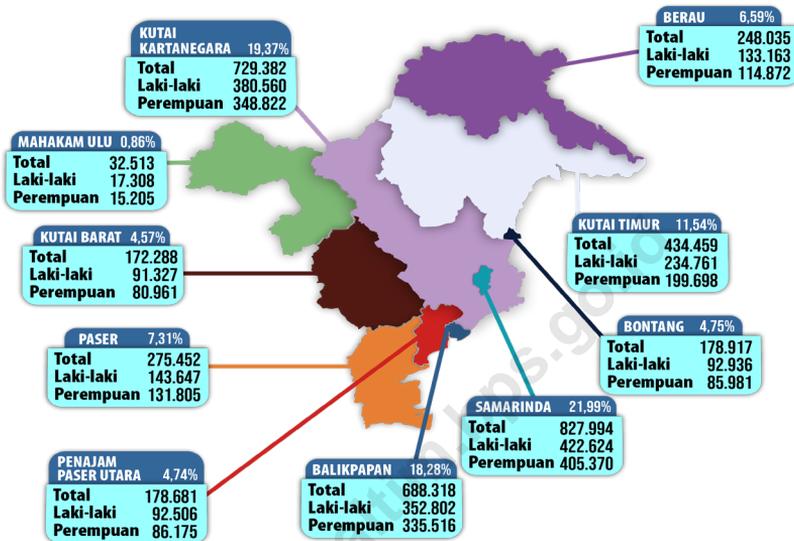


Sumber: Sensus Penduduk 2020

SEBARAN PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR

Penduduk KALIMANTAN TIMUR masih terkonsentrasi di Kota Samarinda

Sebaran Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Luas daratan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 127,27 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Kalimantan Timur dari hasil SP2020 sebanyak 30 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Kalimantan Timur sebanyak 17 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 mencapai 24 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Kalimantan Timur terkonsentrasi di Kota Samarinda. Dengan luas wilayah yg hanya sebesar 0,56 persen dari wilayah Kalimantan Timur, Kota Samarinda dihuni oleh 827.994 penduduk atau 21,99 persen penduduk Kalimantan Timur. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk sebanyak 729.382 jiwa, yaitu sebesar 19,37 persen.



LONG FORM

- Sebagai rangkaian pelaksanaan SP2020, di tahun 2021 akan dilanjutkan dengan pendataan *long form* secara sampel.
- Pendataan ini akan dilaksanakan pada September 2021.
- Tujuan dari pendataan *long form* ini adalah untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk menghasilkan indikator SDG's dan RPJMN khususnya bidang kependudukan.




Sensus
Penduduk
2020
#MencatatIndonesia

 bps.go.id  @bpsdkiJakarta  bpsdkiJakarta  bpsdkiJakarta

TABEL-TABEL

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	143 647	131 805	275 452
Kutai Barat	91 327	80 961	172 288
Kutai Kartanegara	380 560	348 822	729 382
Kutai Timur	234 761	199 698	434 459
Berau	133 163	114 872	248 035
Penajam Paser Utara	92 506	86 175	178 681
Mahakam Ulu	17 308	15 205	32 513
Balikpapan	352 802	335 516	688 318
Samarinda	422 624	405 370	827 994
Bontang	92 936	85 981	178 917
KALIMANTAN TIMUR	1 961 634	1 804 405	3 766 039

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota dan Kesesuaian Alamat Domisili dengan Kartu Keluarga (KK), 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Alamat Domisili Sesuai KK	Alamat Domisili Tidak Sesuai KK	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	245 891	29 561	275 452
Kutai Barat	142 800	29 488	172 288
Kutai Kartanegara	673 850	55 532	729 382
Kutai Timur	369 883	64 576	434 459
Berau	226 344	21 691	248 035
Penajam Paser Utara	160 330	18 351	178 681
Mahakam Ulu	30 708	1 805	32 513
Balikpapan	626 076	62 242	688 318
Samarinda	741 222	86 772	827 994
Bontang	155 704	23 213	178 917
KALIMANTAN TIMUR	3 372 808	393 231	3 766 039

Sumber: Sensus Penduduk 2020



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kaltim.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. Kemakmuran No.4 Samarinda 75117

Telp: (0541) 732793, 743372, Fax: (0541) 201121
Homepage: <https://kaltim.bps.go.id>
Email: bps6400@bps.go.id

ISBN 978-623-7693-20-8 (PDF)

